

ANALISIS PENETAPAN WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SAMOSIR



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

RENHARD GULTOM
NIM. C2B009046

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Renhard Gultom

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009046

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENETAPAN WILAYAH
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
SAMOSIR**

Dosen Pembimbing : Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP

Semarang, 9 Oktober 2013

Dosen Pembimbing

Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP

NIP. 196104161987101001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Renhard Gultom

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009046

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENETAPAN WILAYAH
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
SAMOSIR**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Oktober 2013

Tim Penguji

1. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP (.....)
2. Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc (.....)
3. Banatul Hayati, S.E., M.Si (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Renhard Gultom, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : "**Analisis Penetapan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Samosir**", adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Oktober 2013

Yang membuat pernyataan,

(Renhard Gultom)

NIM : C2B009046

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tetapi kepada manusia Ia berfirman: Sesungguhnya, takut akan Tuhan, itulah hikmat,
dan menjauhi kejahatan itulah akal budi."
-Ayub 28:28-

*Imagination is more important than knowledge. Logic will get you from A to Z;
imagination will get you everywhere.*
-Albert Einstein-

Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi,
keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata."
-WS Rendra-

Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang.
Begitu pun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi
-Siddharta Gautama-

Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia
dan memiliki seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna
untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali
tidak berguna.
-1 Korintus 13:2-

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN

KEPADA TUHAN YESUS KRISTUS SANG PEMBERI KEHIDUPAN,
KEPADA BAPAK, DAN MAMA DAN KEDUA ADIKKU YANG TERKASIH,
KEPADA SAMOSIR, *BONA PASOGIT*, TANAH BATAK YANG INDAH,
DAN KEPADA MASYARAKATNYA YANG DENGAN KESEDERHANAAN
MENANTIKAN KESEJAHTERAAN

ABSTRACT

Samosir Regency is the one of regency which has seperated from Toba Samosir Regency. As a new regency, Samosir must be need a structural, relevant, and efficient development plan. Determining Development Area Unit is the one of theoretical and practical concept which can be referenced in order to make development policy

There are several aims of this research. They were to find out the economical basics and potencies in Samosir Regency, to find out the economical potencies from every subdistricts in Samosir, to find out which subdistricts that can be a growth pole in Samosir, to find out the interactional strength among the districts, and to design a Development Areal Units in Samosir Regency. To reach that aims, this study use Location Quotient, Shift-share analysis, indirect method, Gravitation Analysi, and Scalogram. The data that used in this study are province's GDP, regency's GDP, population quantities, distances among the district's capital and the quantities and type of services facilities available in each subdistrict in Samosir Regency.

The result of the analysis showed that there were 3 Development Area Units that is identified in Samosir Regency. They were Development Area Unit I (DAU I) including Pangururan, Sianjurnulamula, Harian and Ronggurnihuta subdistricts, Development Area Unit II (DAU II) including Simanindo subdistrict, Development Area Unit III (DAU III) including Nainggolan, Palipi, Onanrunggu and Silitio subdistrict.

Keywords : Development Area Unit, Location Quotient, Shift-share, Gravitation, Scalogram, Samosir Regency

ABSTRAKSI

Kabupaten Samosir adalah salah satu kabupaten yang baru saja berdiri setelah berotonomi dan memisahkan diri dari Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Toba Samosir. Sebagai kabupaten yang baru berdiri, tentunya Kabupaten Samosir membutuhkan perencanaan pembangunan yang terstruktur, relevan, dan tepat sasaran. Penetapan Wilayah Pembangunan merupakan salah satu konsep yang secara teoritis dan praktis dapat dijadikan acuan penetapan kebijakan pembangunan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi Kabupaten Samosir dilihat dari basis ekonomi, mengetahui potensi daerah yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan, mengetahui kecamatan yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan, mengetahui kekuatan interaksi antar kecamatan, dan mengetahui berapa banyak wilayah pembangunan dan pusat pertumbuhan di kabupaten samosir serta wilayah mana saja yang masuk ke dalamnya. Dalam pencapaian tujuan tersebut digunakan metode analisis *Location Quotient*, analisis *shift-share*, penentuan sektor basis dengan metode tidak langsung, analisis gravitasi dan analisis skalogram. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa PDRB provinsi, PDRB kabupaten, jumlah penduduk, jarak antar ibukota kecamatan serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan umum yang terdapat di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Samosir

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 3 Wilayah Pembangunan yang dapat ditetapkan di Kabupaten Samosir antara lain Wilayah Pembangunan I (WP I) yang meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjurnulamula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Ronggurnihuta, Wilayah Pembangunan II (WP II) yang meliputi Kecamatan Simanindo, Wilayah Pembangunan III (WP III) yang meliputi Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Onanrunggu dan dan Kecamatan Siotio.

Kata Kunci : Wilayah Pembangunan, *Location Quotient*, *shift-share*, Gravitasi, Skalogram, Samosir

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih karunia yang berlimpah penulis dapat menyelesaikan segala proses studi di Universitas Diponegoro serta menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS PENETAPAN WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SAMOSIR**” sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, dukungan, bantuan, kerja sama, dorongan dan semangat kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Moh. Nasir., Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro
3. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto., MSP., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan koreksi dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan koreksi dan masukan dalam skripsi ini.
5. Ibu Banatul Hayati, S.E., M.Si selaku dosen wali yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menjalani perkuliahan di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
6. Ibu Johanna Maria Kodoatie., S.E., M.Ec., Ph.D. untuk bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan.
7. Pak Dr. Nugroho SBM, MSP yang dengan senang hati memberikan masukan-masukannya yang berharga.
8. Para Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang selama perkuliahan telah mengajar dan mendidik penulis.
9. Para Staf dan Tata Usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
10. Keluargaku, Bapak (Gregorius B Gultom), Mama (Nurhati Sinaga) di kampung, kedua adikku, Roy Hansend Gultom di Semarang dan Ramos Mitrand Gultom di Pematangsiantar. Mereka dengan doa dan cintanya yang luar biasa telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Seluruh Keluarga besar Bapak (Op. Renhard Gultom) dan keluarga besar Mama (Op. Bianto Sinaga) di Samosir.
12. Tulang A. Wina Sinaga dan keluarganya yang dengan semangat membantu penulis selama penelitian di Kabupaten Samosir

13. Keluarga Bapak Tua Santi Sidauruk dan Keluarga Bapak Tua Hotland Siallagan yang dengan senang hati menerima penulis untuk menginap di rumahnya selama penelitian di Samosir
14. Bapak Hot Raja Sitanggang, S.T., M.M., dan Bapak Tommy Naibaho S.E., M.Ec.Dev dari BAPPEDA Kabupaten Samosir
15. Abang Darman Mikael Purba, S.ST dan Kakak Christiani Pandiangan dari BPS Kabupaten Samosir yang dengan senang hati membantu penulis dalam pengumpulan data.
16. BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara, dan BPS Provinsi Sumatera Utara.
17. Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Samosir.
18. Seluruh Camat dan para staf kecamatan di Kabupaten Samosir secara khusus kepada Bapak Drs. J Sihombing (Sianjurmulamula), Bapak Jhonner Sihoteng (Harian), Bapak Paiman Sinaga S.Pd. (Sitiotio), Bapak Viktor Sijinjak S.E. (Onanrunggu), Bapak Si Rambut Putih Sinaga (Nainggolan), Bapak J. Sinaga (Palipi), Bapak Sitor Silalahi (Ronggurnihuta), Ibu Lince Manalu (Pangururan), dan Ibu Tiur Nainggolan (Simanindo)
19. Kakak Fitriana Gultom, Bang Togu Simorangkir dari Yayasan Alusi Tao Toba, Media Go Batak, Pusat Latihan Opera Batak (PLOT) dan semua orang yang bangga menjadi orang batak dan peduli pada tanahnya dan mencintai budayanya.

20. Seluruh Warga Kabupaten Samosir yang dengan penuh kesederhanaan menantikan kesejahteraan.
21. Kakak Laloria N Pardede yang dengan rendah hati memberikan masukan dan saran kepada penulis.
22. Keluarga IESP 2009 yang luar biasa dengan segala kemajemukannya yang mempersatukan.
23. PMK FEB UNDIP dan PRMK FEB UNDIP tempat penulis belajar kehidupan.
24. Kelurahan Teater Obkial secara khusus kepada 13 orang hebat di dalamnya, kepada para pendahulu dan para penerusnya, seluruh Keluarga Teater Buih secara khusus kepada 28 orang Nayantaka, dan PSM UNDIP. Semua wadah ini mengajarkan betapa proses itu lebih penting daripada hasil.
25. Keluarga AUDISIE secara khusus angkatan 2009, NHKBP Kertanegara, PARHATA Semarang, Harumonia, NadaDO untuk semua pengalaman yang telah diberikan.
26. Senior-senior yang baik yang memberi warna pada kehidupan.
27. Keluarga TIM I KKN UNDIP 2013 Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
28. Paramytha Magdalena S.P. S.K.M untuk segala doa, dan dukungan yang telah diberikan.
29. Seluruh Bapak dan Ibu kos dan mulai dari Peleburan sampai Tembalang yang mengizinkan penulis tinggal di rumahnya, dan teman-teman kos yang telah

menjadi teman yang baik. Dan seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari siapapun yang membaca tulisan ini. Hendaknya tulisan ini dapat bermanfaat dan dapat memperkaya khasanah keilmuan yang terkait dengan topik skripsi ini.

Semarang, 9 Oktober 2013

Penulis

Renhard Gultom

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan	16
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Teori Sektor Basis	19
2.1.2 Interaksi Spasial	21
2.1.3 Pusat Pertumbuhan	22
2.1.4 Penetapan Wilayah Pembangunan	24
2.1.5 Ruang dan Perwilayahan	25
2.1.6 Penataan Ruang	27
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.1.1 Potensi Ekonomi.....	39
3.1.2 Interaksi Spasial	39
3.1.3 Pusat Pelayanan	40
3.1.4 Pusat Pertumbuhan.....	40
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.3 Metode Pengumpulan Data	42
3.4 Metode Analisis	42
3.4.1 Indeks LQ (<i>Location Quotient</i>)	42

3.4.2	Analisis <i>Shift-Share</i>	44
3.4.3	Metode Campuran.....	47
3.4.4	Model Gravitasi	47
3.4.5	Analisis Skalogram.....	48
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		51
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	51
4.1.1	Kondisi Geografis	51
4.1.2	Wilayah Administratif	54
4.1.3	Kondisi Demografi	56
4.2	Hasil Analisis	58
4.2.1	Potensi Wilayah	58
4.2.1.1	Potensi Wilayah Kabupaten Samosir	58
4.2.1.2	Potensi Wilayah Kecamatan Sianjurnulamula	65
4.2.1.3	Potensi Wilayah Kecamatan Harian	68
4.2.1.4	Potensi Wilayah Kecamatan Sitiotio	72
4.2.1.5	Potensi Wilayah Kecamatan Onanrunggu	75
4.2.1.6	Potensi Wilayah Kecamatan Nainggolan	77
4.2.1.7	Potensi Wilayah Kecamatan Palipi	81
4.2.1.8	Potensi Wilayah Kecamatan Ronggurnihuta	84
4.2.1.9	Potensi Wilayah Kecamatan Pangururan	86
4.2.1.10	Potensi Wilayah Kecamatan Simanindo	94
4.2.2	Interaksi Antar Wilayah	97
4.2.3	Pusat Pelayanan	107
4.2.4	Penetapan Pusat Pertumbuhan	114
4.3	Interpretasi Hasil.....	116
4.3.1	Penetapan Wilayah Pembangunan	116
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan	119
5.2	Keterbatasan.....	123
5.3	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....		125
LAMPIRAN.....		129

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2010.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Letak Geografis, Ketinggian dan Luas Wilayah Daratan Kecamatan di Kabupaten Samosir	53
Tabel 4.2 Banyaknya Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan.....	54
Tabel 4.3 Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan, 2011.....	57
Tabel 4.4 Indeks LQ Kabupaten Samosir 201	59
Tabel 4.5 Analisis <i>Shift-share</i> Kabupaten Samosir 2010	63
Tabel 4.6 Produktivitas Tanaman Padi dan Tanaman Kopi Kecamatan Sianjur-Mulamula 2011.....	66
Tabel 4.7 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan dan Desa di Kecamatan Harian	70
Tabel 4.8 Akses / Sarana Transportasi per Desa di Kecamatan Siotio.....	72
Tabel 4.9 Produktivitas Pertanian Padi Sawah dan Kopi di Kecamatan Siotio 2011.....	73
Tabel 4.10 Lahan Pertanian Padi Sawah dan Perkebunan Kopi Rakyat di Kecamatan Onanunggu 2011	75
Tabel 4.11 Produktivitas Pertanian Padi di Kecamatan Nainggolan 2011	78
Tabel 4.12 Penggunaan Lahan Untuk Perkebunan Kopi Rakyat di Kecamatan Nainggolan 2011	79
Tabel 4.13 Produktivitas Pertanian Padi Kecamatan Palipi 2011	81
Tabel 4.14 Luas Lahan Perkebunan Kopi Kecamatan Palipi 2011	82
Tabel 4.15 Analisis LQ Komoditas Ternak Kecamatan Palipi 2011	83
Tabel 4.16 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Padi Kecamatan Ronggurnihuta 2011.....	84
Tabel 4.17 Luas Tanaman Kopi per Desa di Kecamatan Ronggurnihuta 2011....	85
Tabel 4.18 Luas Area, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pangururan 2011.....	88
Tabel 4.19 Perbandingan Produktivitas Pertanian Padi Kecamatan Pangururan Terhadap Kabupaten Samosir 2011	90
Tabel 4.20 Jumlah Populasi Hewan Ternak Kecamatan Pangururan 2011.....	91
Tabel 4.21 Kontribusi Jumlah Populasi Ternak di Kecamatan Pangururan Terhadap Kabupaten Samosir 2011.....	92
Tabel 4.22 Produktivitas Komoditas Kopi Kecamatan Pangururan 2011.....	95
Tabel 4.23 Analisis LQ Subsektor Peternakan di Kecamatan Simanindo 2011	96

	Halaman
Tabel 4.24 Indeks Gravitasi Kabupaten Samosir.....	97
Tabel 4.25 Klasifikasi Kekuatan Interaksi Antar Kecamatan di Kabupaten Samosir.....	99
Tabel 4.26 Interaksi Antar Kecamatan di Kabupaten Samosir	100
Tabel 4.27 Kekuatan Interaksi Antar Kecamatan di Kabupaten Samosir	102
Tabel 4.28 Analisis Skalogram (banyaknya jumlah fasilitas)	108
Tabel 4.29 Analisis Skalogram (banyaknya jenis fasilitas).....	110
Tabel 4.30 Analisis Skalogram Kabupaten Samosir	114
Tabel 4.31 Penetapan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Samosir	116
Tabel 4.32 Penetapan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Samosir	117

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Silsilah Kabupaten Samosir.....	7
Gambar 1.2	<i>Triangle</i> Pengembangan Kabupaten Samosir.....	11
Gambar 1.3	Peta <i>Triangle</i> Pengembangan Kabupaten Samosir.....	13
Gambar 2.1	Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan.....	23
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Samosir.....	55
Gambar 4.2	Lahan Pertanian Padi Desa Sianjurmulamula.....	67
Gambar 4.3	Lahan Perkebunan Kopi Aek Sipitudai	67
Gambar 4.4	Lahan Pertanian Padi Sawah Desa Turpuk Sihotang.....	69
Gambar 4.5	Tampak Pegunungan Kecamatan Harian	71
Gambar 4.6	Dermaga Sabulan Kecamatan Siotio.....	72
Gambar 4.7	Lahan Pertanian Desa Cinta Maju	74
Gambar 4.8	Lahan Pertanian Padi Sawah Kecamatan Onanrunggu.....	76
Gambar 4.9	Lahan Pertanian Padi Sawah Desa Pangaloan.....	77
Gambar 4.10	Lahan Pertanian Padi Sawah Desa Bonor Ompu Ratus.....	80
Gambar 4.11	Lahan Pertanian Padi Desa Palipi.....	83
Gambar 4.12	Lahan Perkebunan Kopi Desa Ronggurnihuta	85
Gambar 4.13	Kantor Bupati Kabupaten Samosir	86
Gambar 4.14	Kawasan Perkantoran Kabupaten Samosir di Desa Parbaba.....	87
Gambar 4.15	Lahan Pertanian Padi di Kecamatan Pangururan.....	89
Gambar 4.16	Kawasan Perdagangan Pasar Pangururan	93
Gambar 4.17	Perkebunan Kopi Rakyat Desa Tanjungan dan Huta Ginjang.....	94
Gambar 4.18	Peta Kekuatan Interaksi Sangat Kuat Kabupaten Samosir.....	103
Gambar 4.19	Peta Kekuatan Interaksi Kuat Kabpaten Samosir.....	104
Gambar 4.20	Peta Kekuatan Interaksi Sedang Kabupaten Samosir.....	105
Gambar 4.21	Peta Kekuatan Interaksi Lemah Kabupaten Samosir.....	106
Gambar 4.22	Polindes Desa Tomok Kecamatan Simanindo.....	109
Gambar 4.23	Terminal dan Rumah Sakit Pangururan	115
Gambar 4.24	Peta Wilayah Pembangunan Kabupaten Samosir.....	118

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Peta Administrasi Kecamatan di Kabupaten Samosir.....	128
Lampiran B Hasil Analisis	138
Lampiran C Dokumentasi Penelitian	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara dengan tingkat kemajemukan sosial yang amat tinggi. Penduduk Indonesia berjumlah sekitar 237 juta jiwa pada tahun 2010 yang tersebar di lima pulau besar dan sekitar 7.662 pulau-pulau kecil lainnya dari total 13.667 pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri atas lebih dari 100 etnis dan subetnis, sekitar 1128 suku bangsa, dan sekitar 582 bahasa dan dialek lokal dengan karakter, budaya, lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Fenomena kemajemukan seperti ini mengakibatkan perbedaan keinginan dan kebutuhan (*wants and needs*) masing-masing wilayah. Akibatnya lagi adalah akan ditemukannya perbedaan aktivitas perekonomian di tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula. Sebagai negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi tersebut, Indonesia memiliki potensi yang besar akan terjadinya ketimpangan antar-wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Syafrizal, 2008)

Pembangunan daerah seharusnya diarahkan untuk memacu pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, program otonomi daerah adalah salah satu solusi untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Amanat tentang otonomi daerah tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi ; “ pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka UUD 1945 pasal 18 adalah salah satu bukti dan landasan penting untuk dilaksanakannya suatu otonomi daerah. (Panjaitan, 2006). Dengan dicanangkannya perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah tersebut, diharapkan kesenjangan sosial antarwilayah bisa diminimalisir dan atau dieliminir sehingga dapat tercapai pemerataan pembangunan.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah, masing-masing wilayah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Hal ini didukung pula oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip otonomi, daerah diberikan wewenang yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Program Otonomi Daerah menuntut kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di daerah masing-masing. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan juga diperlukan aktif agar dapat mendorong dan mendukung perekonomian daerah sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada.

Pembangunan daerah otonom sekarang ini diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan wilayah melalui kebijakan daerah. Dalam usaha pembangunan wilayah tersebut, dibutuhkan suatu kebijakan wilayah untuk membantu pemerintah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan daerah. Sama halnya dengan pembangunan di tingkat nasional, pembangunan di tingkat wilayah juga perlu dilakukan. Urgensi dan peranan pembangunan wilayah berbeda pada waktu pembangunan negara bersifat sentralisasi dan otonomi (desentralisasi). Pada saat pola pemerintahan nasional sudah terdesentralisasi, maka urgensi dan peranan kebijakan pembangunan wilayah menjadi lebih besar dan lebih penting dibanding dengan pada saat pola pemerintahan masih bersifat sentralistik. Dalam kondisi demikian, daerah dapat menetapkan kebijakan pembangunan yang berbeda-beda (tidak harus terpatok pada kepentingan nasional) sesuai dengan kondisi, permasalahan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Penerapan konsep “Wilayah Pembangunan” merupakan sebuah media untuk memperoleh rumusan strategi kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berbasis wilayah. Wilayah Pembangunan merupakan suatu konsep dengan

menentukan dan menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat dari proses pembangunan dan wilayah-wilayah lain sebagai satelitnya. Dengan diterapkannya konsep ini, maka masing-masing wilayah dengan karakteristik yang berbeda diharapkan dapat mengoptimalkan potensi masing-masing untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Menurut Syafrizal (2008) dalam perumusan kebijakan wilayah, diperlukan terlebih dahulu pengelompokan wilayah pembangunan baik dalam suatu negara, provinsi, kabupaten, maupun kota dengan memperhatikan kondisi dan potensi wilayah yang bersangkutan. Penetapan wilayah pembangunan ini perlu dilakukan agar pemberlakuan kebijakan pembangunan wilayah tersebut dapat ditentukan dengan tepat, jelas dan terarah sesuai dengan kondisi, permasalahan, potensi dan kewenangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Samosir merupakan salah satu dari 32 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk atas diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu pula, Kabupaten Samosir dapat dikatakan sebagai kabupaten yang baru, karena Kabupaten ini baru saja berdiri pada tahun 2004.

Dari sisi historis, dulunya Kabupaten Samosir bersama 4 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Toba Samosir adalah satu kesatuan kabupaten saja yaitu Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan berbagai proses maka kabupaten ini mekar menjadi lima kabupaten yang berbeda yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi yang

pertamakali memekarkan diri, kemudian diikuti Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan dan terakhir Kabupaten Samosir.

Wilayah Kabupaten Samosir sebelum menjadi Kabupaten merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Kabupaten induknya. Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibentuk dengan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara yang pada awal terbentuknya terdiri dari 5 (lima) distrik atau kewedanaan yaitu Kewedanaan Silindung, Toba Holbung, Humbang, Samosir, dan Kewedanaan Dairi. Mengingat demikian luasnya Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, maka pada Tahun 1964 dilakukan pemekaran dengan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi yang ibukotanya berkedudukan di Sidikalang. Selanjutnya, walaupun sudah dimekarkan dengan terbentuknya Kabupaten Dairi, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari 27 Kecamatan dan 971 Desa masih dirasakan sangat luas, bahkan masih ada wilayah desa yang harus dijangkau dalam waktu tempuh lebih dari satu hari yang berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan pembangunan.

Dengan alasan pemerataan kesejahteraan dan percepatan pembangunan, pada tahun 1998, wilayah Toba Samosir akhirnya memekarkan diri sebagai Kabupaten pertama yang memisahkan diri dari Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Tapanuli

Utara. Kabupaten yang baru mekar ini kemudian disebut sebagai Kabupaten Toba Samosir dengan kota Balige sebagai ibukota Kabupatennya. Seiring berjalannya proses pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Toba Samosir sebagai kabupaten yang baru ditemukan pula ketimpangan pembangunan antara wilayah yang dekat dengan ibukota Kabupaten dengan yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten.

Tomy Naibaho selaku Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Samosir pada wawancara tanggal 29 April 2013 mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir terhadap wilayah Samosir dan sekitarnya hanya mencapai maksimal 20% dari total APBD. Karena pada waktu itu (pada tahun 1998-2003), sebagai kabupaten yang baru mekar, pembangunan lebih terpusat di pusat ibukota kabupaten yaitu kota Balige. Selain itu, akses pelayanan publik masih terpusat ke arah ibukota Kabupaten yang tentunya kurang menjangkau daerah-daerah di pelosok kabupaten yang dapat dikatakan “terisolasi” pada waktu itu (pada tahun 1998-2003).

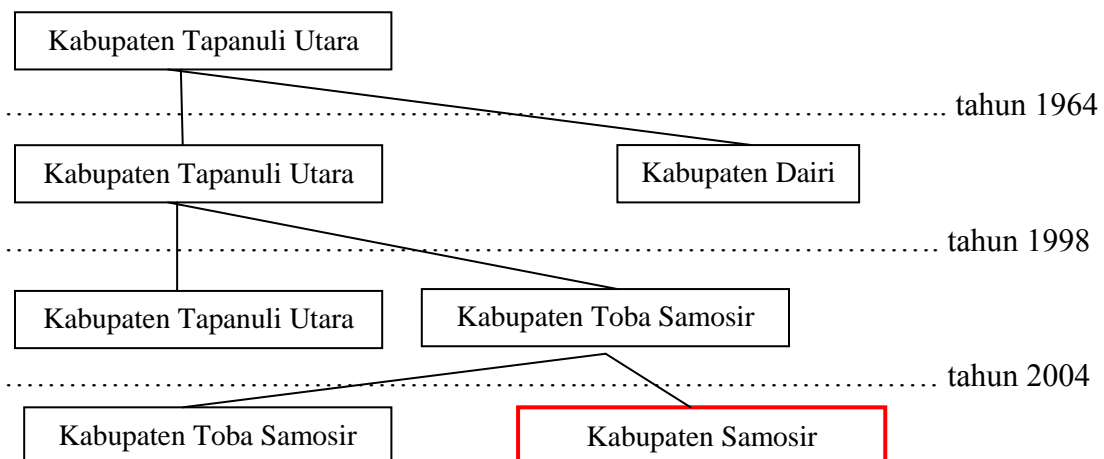
Sesuai dengan pendapat Bapak Hot Raja Sitanggang (mantan kepala BAPPEDA kabupaten Samosir) dengan alasan:

1. Mendekatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat (khususnya wilayah Samosir)
2. Melakukan percepatan Pembangunan di wilayah Samosir yang terdiri dari 9 kecamatan (lihat tabel 1.1)

3. Menciptakan pemerataan dan keadilan dalam hal alokasi pembangunan.

Maka, usulan untuk memekarkan wilayah Samsir menjadi Kabupaten yang mandiri pun muncul ke permukaan. Kemudian, dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Toba Samsir, pada tanggal 26 Juni 2002 beberapa utusan atau delegasi masyarakat Samsir didampingi Pimpinan DPRD Kabupaten Toba Samsir menemui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat akan Pemekaran Kabupaten Toba Samsir dengan Pembentukan Kabupaten Samsir. Akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia resmi memekarkan Kabupaten Samsir pada tanggal 7 Januari 2004.

Gambar 1.1
Silsilah Kabupaten Samsir



Sumber: <http://www.samosirkab.go.id>, diolah.

Dengan mekarnya Kabupaten Samosir sebagai Kabupaten, maka secara resmi pula Kabupaten Samosir bergabung menjadi salah satu dari 25 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1
Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2010

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Rasio Terhadap Total
-1	-2	-3
<i>Kabupaten</i>		
1 Nias	980,32	1,37
2 Mandailing Natal	6620,70	9,24
3 Tapanuli Selatan	4352,86	6,07
4 Tapanuli Tengah	2158,00	3,01
5 Tapanuli Utara	3764,65	5,25
6 Toba Samosir	2352,35	3,28
7 Labuhan Batu	2561,38	3,57
8 Asahan	3675,79	5,13
9 Simalungun	4368,60	6,09
10 Dairi	1927,80	2,69
11 Karo	2127,25	2,97
12 Deli Serdang	2486,14	3,47
13 Langkat	6263,29	8,74
14 Nias Selatan	1625,91	2,27
15 Humbang Hasundutan	2297,20	3,20
16 Pakpak Bharat	1218,30	1,70
17 Samosir	2443,50	3,39
18 Serdang Bedagai	1913,33	2,67
19 Batu Bara	904,96	1,26
20 Padang Lawas Utara	3918,05	5,47
21 Padang Lawas	3892,74	5,43
22 Labuhan Batu Selatan	3116,00	4,35
23 Labuhan Batu Utara	3545,80	4,95
24 Nias Utara	1501,63	2,09
25 Nias Barat	544,09	0,76
<i>Kota</i>		
1 Sibolga	10,77	0,02
2 Tanjungbalai	61,52	0,09
3 Pematangsiantar	79,97	0,11
4 Tebingtinggi	38,44	0,05
5 Medan	265,10	0,37
6 Binjai	90,25	0,13

7	Padangsidempuan	114,65	0,16
8	Gunung Sitoli	469,36	0,65
<u>Sumatera Utara</u>		<u>71 680,68</u>	<u>100,00</u>

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2011

Jika dibandingkan dengan seluruh luas Provinsi Sumatera Utara, proporsi luas Kabupaten Samosir berdasarkan tabel 1.1 di atas adalah sebesar 3,39 %. Diantara 5 kabupaten yang memekarkan diri dari Kabupaten Tapanuli Utara (Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan) Kabupaten Samosir adalah kabupaten yang terluas kedua dengan luas wilayahnya sebesar 2.433,50 Km² setelah Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas wilayahnya sebesar 3764,65 Km² diikuti Kabupaten Toba Samosir dengan luas wilayah sebesar 2.352,35 Km², Kabupaten Humbang Hasundutan yang luasnya 2.297,20 Km² dan Kabupaten Dairi dengan luas 1.927,80 Km²(lihat tabel 1.1)

Sebagai Kabupaten yang tergolong baru berdiri, tentunya akan sangat diperlukan perencanaan pembangunan wilayah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, konsep wilayah pembangunan dapat diterapkan di Kabupaten Samosir untuk membantu diperolehnya kebijakan pembangunan wilayah yang efektif dan efisien sesuai dengan permasalahan, dan potensi yang ada di masing-masing daerah.

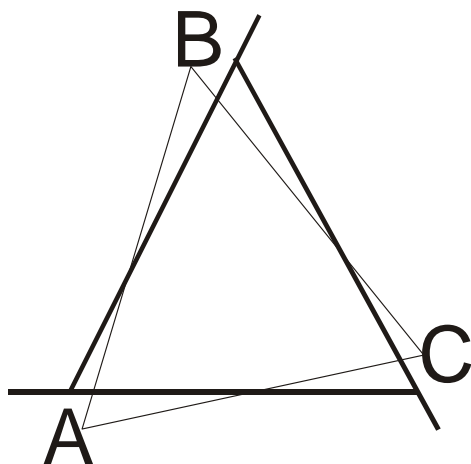
Berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2005-2010, secara garis besar disampaikan bahwa

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir masih terfokus kepada peletakan pondasi dasar pembangunan. Menurut penuturan Hot Raja Sitanggung pada wawancara tanggal 30 April 2013, RPJMD pertama Kabupaten Samosir itu hanya terfokus pada tahapan persiapan-persiapan pembangunan dan pembenahan pondasi dasar pembangunan termasuk persiapan-persiapan kerangka struktur yang ideal terkait dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Daerah (SKPD). Artinya, Kabupaten Samosir dalam menyusun RPJMD nya yang pertama masih menyentuh aspek-aspek perencanaan pembangunan yang sifatnya masih dasar. Sehingga, pada waktu itu belum terdapat perencanaan yang detail terkait dengan konsep penetapan wilayah pembangunan di Kabupaten Samosir.

Sedangkan pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 telah terdapat perencanaan wilayah yang lebih detail dan lebih lengkap dari periode sebelumnya. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Samosir pada tahun 2011-2015 (sesuai dengan visi Bupati Kabupaten Samosir 2011-2015), pembangunan Kabupaten Samosir diarahkan kepada pengembangan wilayah di bidang pariwisata. Melihat sisi geografis, historis dan sosial yang ada di Kabupaten Samosir, maka ditetapkan visi Kabupaten Samosir tahun 2011-2015 yaitu “Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Lingkungan yang Inovatif 2015”. Pada RPJMD periode ini, pembangunan daerah Kabupaten Samosir melanjutkan tahapan awal pembangunan dari periode sebelumnya.

Menurut penuturan Hot Raja Sitanggung, pada RPJMD Kabupaten Samosir periode 2011-2015, pembangunan wilayah Kabupaten Samosir seluruhnya diarahkan kepada aspek pariwisata. Sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Samosir, pengembangan yang dirasa paling tepat adalah pengembangan destinasi pariwisatanya. Misalnya, walaupun ada pengembangan sektor (selain pariwisata) industri, industri tersebut harus menjadi industri yang mengembangkan pariwisata. Atau sektor pertanian harus menjadi pertanian yang mendukung pariwisata. Ditambah lagi, 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir semuanya memiliki destinasi pariwisata, baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah. Sehingga dapat dikatakan sektor pariwisata adalah suatu modal otonom yang harus pertamakali dikembangkan. Menurut Hot Raja Sitanggung, untuk pencapaian visi yang dimaksud, maka dibentuklah suatu model perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Samosir. Model tersebut adalah “Triangle” Wilayah Pengembangan Kabupaten Samosir.

Gambar 1.2
***Triangle* Pengembangan Wilayah Kabupaten Samosir**



Keterangan:

A : kawasan Pangururan dan Sianjur Mulamula

B : kawasan Tomok dan sekitarnya

C : kawasan Onan Runggu dan Sekitarnya

Sumber : wawancara dengan Hot Raja Sitanggang, diolah

Terdapat 3 wilayah yang difokuskan untuk dikembangkan di Kabupaten Samosir sebagai pusat pengembangannya yaitu:

1. Kawasan Ibu Kota Kabupaten dan Sianjur Mula Mula

Wilayah perkotaan pariwisata dikonsentrasikan di ibukota Kabupaten Samosir yaitu Kota Pangururan, dan wilayah Sianjur Mula Mula yang secara historis kultural adalah tempat asal muasal peradaban Batak dikonsentrasikan sebagai Cagar Budaya Kabupaten Samosir.

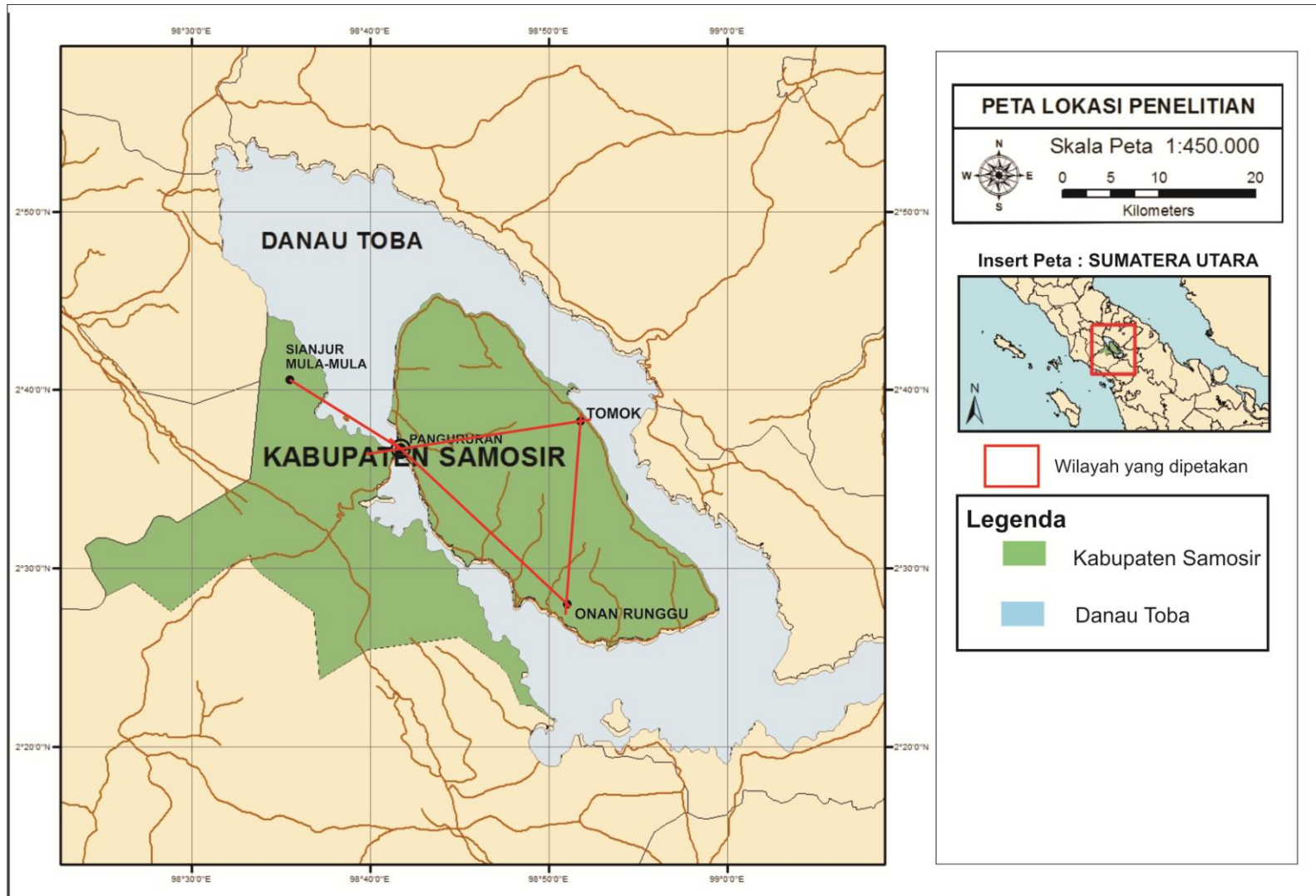
2. Kawasan Tomok dan Sekitarnya

Kawasan Tomok dan sekitarnya diarahkan sebagai daerah yang mendukung sarana dan prasarana pariwisata yang meliputi hotel, restoran, *souvenir shop*, dll.

3. Kawasan Onan Runggu dan Sekitarnya

Kawasan Onan Runggu dan Sekitarnya diarahkan sebagai kawasan destinasi alam yang meliputi topografi, pantai dan gejala-gejala morfologi wilayah.

Gambar 1.3
Peta *Triangle* Pengembangan Wilayah Kabupaten Samosir



Sumber: Peta Digital Bakosurtanal, diolah

Secara teoritis, penetapan wilayah Pembangunan penting dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan. Menurut Syafrizal (2008) dalam perumusan kebijakan wilayah, diperlukan terlebih dahulu pengelompokan wilayah pembangunan baik dalam suatu negara, provinsi, kabupaten, maupun kota dengan memperhatikan kondisi dan potensi wilayah yang bersangkutan. Penetapan wilayah pembangunan ini perlu dilakukan agar pemberlakuan kebijakan pembangunan wilayah tersebut dapat ditentukan dengan tepat, jelas dan terarah sesuai dengan kondisi, permasalahan, potensi dan kewenangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Secara praktis, penetapan wilayah pembangunan di Kabupaten Samosir tentunya akan dapat berguna sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Samosir. Penetapan wilayah pembangunan akan dapat menjadi masukan dan acuan serta bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan periode berikutnya. Dalam amanah UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, ada yang disebut sebagai tahapan-tahapan pembangunan. Dalam penyusunan RPJMD, hasil evaluasi RPJMD periode yang lalu tentunya akan menjadi acuan. Selain itu pendekatan teknokrat yang mengedepankan aspek analitis sangat diperlukan untuk kepentingan objektivitas kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, untuk digunakan sebagai penajaman-penajaman rencana aksi atas penetapan wilayah pembangunan Kabupaten Samosir, maka judul penelitian ini

adalah “ANALISIS PENETAPAN WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SAMOSIR”

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Samosir memiliki bentang alam pegunungan dan Danau Toba yang sangat berpotensi pada bidang pariwisata. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Samosir pada tahun 2011-2015 mengacu pada pembangunan Kabupaten Samosir yang diarahkan pada sektor jasa pariwisata. Namun, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Samosir sendiri masih bergantung pada sektor pertanian. Untuk itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang terstruktur, relevan, dan tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan, keadaan alam serta kondisi kemasyarakatan di Kabupaten Samosir sendiri.

Secara teoritis dan praktis, penetapan Wilayah Pembangunan penting dilaksanakan di Kabupaten Samosir. Penetapan Wilayah Pembangunan akan menjelaskan keadaan suatu wilayah dengan sudut pandang ekonomi regional. Dengan ditetapkannya Wilayah Pembangunan pula, pemerintah dapat memperkaya acuan dan masukan-masukan dalam penetapan wilayah pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pertanyaan penelitian yang ditemukan adalah:

1. Bagaimana kondisi terkini Kabupaten Samosir dilihat dari basis ekonomi?

2. Berdasarkan basis ekonomi, apa saja potensi daerah yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir?
3. Kecamatan mana yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan di Kabupaten Samosir?
4. Bagaimana kekuatan interaksi antar kecamatan di Kabupaten Samosir
5. Berapa banyak Wilayah Pembangunan dan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Samosir, serta wilayah mana saja yang masuk ke dalamnya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi Kabupaten Samosir dilihat dari Basis ekonominya.
2. Untuk mengetahui potensi daerah yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Samosir berdasarkan basis ekonomi.
3. Untuk mengetahui Kecamatan yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan di Kabupaten Samosir.
4. Untuk mengetahui kekuatan interaksi antar kecamatan di Kabupaten Samosir
5. Untuk mengetahui berapa banyak Wilayah Pembangunan dan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Samosir, serta wilayah mana saja yang masuk ke dalamnya.

Apabila tujuan tersebut di atas tercapai, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca maupun kepada pihak-pihak terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan-masukan kepada para pembuat kebijakan (*policy makers*) di Kabupaten Samosir dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan khususnya kebijakan pembangunan wilayah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pendalaman teori ekonomi wilayah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan tolok ukur untuk penelitian sejenis yang berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang hendak disajikan adalah sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai dengan topik dari skripsi

yang dapat membantu penulisan. Dalam Bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran atas permasalahan yang akan diteliti.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi uraian mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Bab ini juga berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional variabel yang diambil dalam penelitian, penentuan sampel, jenis data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data sampai dengan metode analisis.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penyajian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, baik melalui studi pustaka ataupun melalui penelitian lapangan. Pembahasan hasil penelitian tersebut merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan terlebih dahulu dalam bab pendahuluan.

5. BAB V : PENUTUP

Berisi tentang berbagai kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan beberapa saran yang merupakan rekomendasi penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sektor Basis

Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam satu negara maupun ke wilayah lain di negara lain. Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah karena kegiatan basis. Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis (termasuk ke dalam kegiatan sektor jasa atau pelayanan) disebut sebagai sektor non basis.

Menurut Tarigan (2005), ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menetapkan yang mana kegiatan basis dan non basis, yaitu:

1. Metode Langsung

Metode ini dilakukan dengan survei langsung langsung kepada pelaku usaha dan kegiatannya. Survey yang dimaksud meliputi arus keluar masuk barang dan jasa seperti kemana barang yang diproduksi dipasarkan dan darimana mereka membeli bahan dasar produksi. Kemudian dapat ditentukan persentase produk yang dijual ke luar wilayah dan yang dipasarkan ke dalam wilayah.

2. Metode Tidak Langsung

Metode Tidak Langsung dilakukan dengan menggunakan asumsi. Berdasarkan kondisi wilayah tersebut (dari data sekunder), ada kegiatan yang diasumsikan sebagai sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual ke luar wilayah dianggap sebagai sektor basis dan kegiatan yang mayoritas produknya dipasarkan hanya di dalam wilayah disebut sektor non basis.

3. Metode Campuran

Metode campuran menggabungkan metode langsung dan tidak langsung

4. Location Quotient (LQ)

LQ adalah Metode yang membandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah sektor tertentu di wilayah lokal dengan porsi lapangan kerja atau nilai tambah sektor tertentu di wilayah nasional (hierarki wilayah yang lebih tinggi).

5. Analisis *Shift-Share*

Metode ini menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah, dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional. Dengan demikian dapat ditemukan adanya pergeseran dari hasil pembangunan perekonomian daerah jika daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional.

Menurut Syafrizal (2008), perekonomian adalah penjumlahan dari kegiatan sektor basis dan kegiatan sektor non basis yang dipresentasikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = B + S \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana: Y = Perekonomian atau Pendapatan Daerah

B = Sektor Basis

S = Sektor non basis

2.1.2 Interaksi Spasial

Interaksi spasial merupakan hubungan antara wilayah yang satu dengan yang lain. Hubungan atau interaksi yang dimaksud dapat berupa interaksi tertentu dengan motif tertentu pula. Misalnya interaksi perdagangan dengan motif ekonomi. Menurut Hayness dan Fotheringham (1984) dalam jurnalnya yang berjudul “*Gravity and Spatial Interaction Models*” mengungkapkan definisi interaksi spasial sebagai berikut:

“Spatial interaction is a broad term encompassing any movement over space that results from a human process . It includes journey-to-work, migration, information and commodity flows, student enrollments and conference attendance, the utilization of public and private facilities, and even the transmission of knowledge “

Dari pernyataan tersebut di atas, interaksi spasial adalah sesuatu yang mencakup tentang semua pergerakan atau mobilitas pada suatu ruang atau wilayah yang disebabkan oleh perilaku manusia seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, aliran barang dan jasa serta informasi, pergerakan mahasiswa dengan alasan pendidikan, dan kegiatan lainnya termasuk penggunaan fasilitas publik dan persebaran ilmu pengetahuan.

2.1.3 Pusat Pertumbuhan

Richardson (dalam Syafrizal, 2008) memberikan definisi Pusat Pertumbuhan sebagai berikut:

“ A growth pole was defined as a set of industries capable of generating dynamic growth in the economy, and strongly interrelated to each other via input-output linkages around a leading industry (Propulsive Industry)”

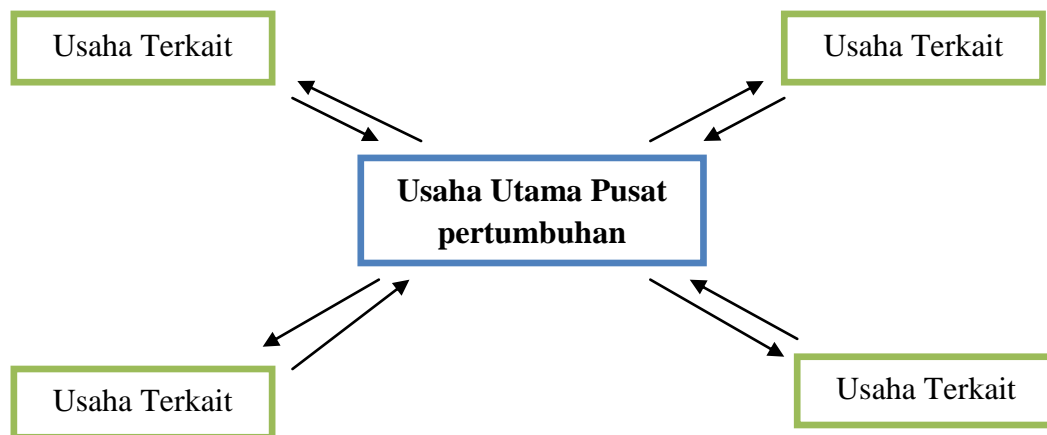
Berdasarkan definisi ini terdapat 4 karakteristik utama pusat pertumbuhan yaitu:

1. Adanya sekelompok kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di suatu lokasi tertentu.
2. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian
3. Terdapat keterkaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut
4. Dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut.

Adanya sekelompok kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu merupakan karakteristik utama dari sebuah pusat pertumbuhan. Analisis Pusat pertumbuhan juga tidak bisa diberlakukan untuk kegiatan ekonomi tertentu saja, tetapi harus menyangkut dengan kumpulan beberapa kegiatan ekonomi. Biasanya pusat pertumbuhan ini berlokasi di daerah perkotaan atau daerah tertentu yang mempunyai potensi ekonomi spesifik seperti pertambangan, perlapuhan,

perkebunan dan lain-lain. (Syafizal, 2008). Struktur ekonomi pusat pertumbuhan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan



Sumber: Syafrizal (2008), diolah

Menurut Budiharsono (2001) Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat pertumbuhan adalah :

- a. Letak suatu wilayah yang strategis menyebabkan suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan.
- b. Ketersediaan sumber daya alam pada suatu wilayah akan menyebabkan wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan.
- c. Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompok pada suatu lokasi karena adanya suatu keuntungan yang kemudian akan menyebabkan timbulnya pusat pertumbuhan.

- d. Faktor investasi pemerintah merupakan sesuatu yang disengaja dibuat (*artificial*).

Pada dasarnya pusat wilayah mempunyai hierarki. Hierarki dari suatu pusat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Jumlah penduduk yang bermukim pada pusat tersebut
2. Jumlah fasilitas pelayanan umum yang tersedia, dan
3. Jumlah jenis fasilitas pelayanan umum yang tersedia.

2.1.4 Penetapan Wilayah Pembangunan

Penetapan wilayah pembangunan perlu dilakukan agar pemberlakuan kebijakan pembangunan wilayah dapat ditentukan dengan jelas dan tegas sampai dimana wilayah cakupannya. Syafrizal (2008) mengungkapkan bahwa penetapan wilayah pembangunan perlu memperhatikan 4 aspek utama yaitu:

- a. Kesamaan kondisi, permasalahan dan potensi umum daerah baik di bidang ekonomi, sosial, dan geografi (*Homogeneous Region*). Aspek kesamaan ini sangat penting artinya agar kebijakan pembangunan wilayah tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kondisi dan potensi utama wilayah yang bersangkutan.
- b. Keterkaitan yang erat antara daerah-daerah yang tergabung dalam wilayah pembangunan bersangkutan (*Nodal Region*). Keterkaitan ini dapat diketahui melalui data tentang kegiatan perdagangan antar daerah dan mobilitas

penduduk (*migration*) antar daerah. Aspek keterkaitan ini penting artinya untuk kebijakan pembangunan wilayah yang ditetapkan, yang dapat mendorong terjadinya keterpaduan dan sinergi pembangunan antar daerah dalam wilayah bersangkutan.

- c. Kesamaan karakteristik geografis antar daerah yang tergabung dalam wilayah pembangunan tersebut (Wilayah Fungsional). Karakteristik tersebut meliputi jenis daerah (pantai, pegunungan, atau daerah aliran sungai), kesuburan, kesesuaian lahan, dan potensi sumberdaya alam. Aspek ini sangat penting dalam penentuan wilayah pembangunan agar kebijakan yang ditetapkan dapat didukung oleh kondisi geografis dan potensi sumberdaya alam wilayah yang bersangkutan, sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah menjadi cepat.
- d. Kesatuan wilayah administrasi pemerintah yang tergabung dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan (*Planning Region*). Aspek kesatuan wilayah administrasi ini sangat penting artinya agar perumusan kebijakan dan perencanaan dapat terjamin pelaksanaannya karena sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.1.5 Ruang dan Perwilayahan

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Sementara menurut Tarigan (2005) ruang dapat berarti sempit maupun berarti luas. Ruang merupakan tempat untuk suatu tempat atau kegiatan atau apabila kosong bisa diisi dengan suatu benda atau kegiatan. Dalam hal ini kata tempat adalah berdimensi tiga dan kata “benda” atau “kegiatan” berarti benda apa saja dan kegiatan apa saja tanpa batas.

Wilayah dapat dilihat sebagai ruang pada permukaan bumi. pengertian permukaan bumi merujuk pada tempat yang dapat dilihat secara vertikal maupun horizontal. Menurut Glasson (dalam Tarigan, 2005) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu cara pandang subyektif dan objektif.

1. Cara pandang subjektif memandang wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu dan tujuan tertentu pula. Dengan demikian wilayah hanyalah suatu model untuk membedakan lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya.
2. Cara pandang objektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah seperti musim, temperatur, konfigurasi lahan dan lain-lain. Cara pandang objektif membuat analisis terhadap ruang menjadi lebih sempit.

Untuk kepentingan penelitian, cara pandang yang paling sering digunakan adalah cara pandang subjektif karena dapat disesuaikan dengan tujuan studi atau penelitian tertentu.

2.1.6 Penataan Ruang

Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang, Yang dimaksud dengan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan yang dimaksud dengan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Maka yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Analisis Penetapan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Toba Samosir” ditulis oleh Laloria Pardede pada tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan di kabupaten Toba Samosir, mengidentifikasi kekuatan interaksi antar

kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir, mengetahui kecamatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan, dan menetapkan wilayah pembangunan berdasarkan potensi daerah, kekuatan interaksi antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan. Alat analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis LQ, Analisis Gravitasi, dan Analisis Skalogram. Hasil penelitiannya adalah ada empat wilayah pembangunan yang dapat ditetapkan di Kabupaten Samosir yaitu: Wilayah Pembangunan I meliputi kecamatan Balige, Kecamatan Laguboti dan Kecamatan Tampahan. Wilayah Pembangunan II meliputi kecamatan Porsea, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumbanjulu, Kecamatan Uluan, dan Kecamatan Pintu Pohan. Wilayah Pembangunan III meliputi Kecamatan Silaen, Kecamatan Sigumpar, dan Kecamatan Siantar Narumonda serta Wilayah Pembangunan IV yang meliputi kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, dan Kecamatan Borbor.

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banjarnegara” ditulis oleh Refika Ardila pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan, interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan hinterlandnya, kondisi perekonomian kecamatan dan sektor ekonomi potensial di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Analisis yang digunakan adalah analisis skalogram dan indeks sentralitas, metode gravitasi, analisis tipologi klassen dan analisis Location Quotient. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh enam kecamatan yang termasuk kecamatan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Banjarnegara, Madukara,

Purwanegara, Mandiraja, Purwareja Klampok dan Susukan. Terdapat interaksi dan angka interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan hinterlandnya berbeda-beda. Sebagian besar kecamatan masih berada pada daerah relatif tertinggal. Rata-rata sektor basis menyebar secara merata di 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, namun sektor basis yang paling dominan adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat enam kecamatan pusat pertumbuhan yang saling berinteraksi dengan kecamatan di sekitarnya. Kondisi perekonomian dan sektor basis di tiap kecamatan berbeda-beda.

Penelitian yang berjudul “Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan ditulis oleh Sasya Danastri pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini tersebut adalah: (i) untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini Kecamatan Harjamukti dilihat dari aspek ekonomi, aspek kependudukan dan aspek fasilitas pelayanan publik, (ii) untuk mengetahui interaksi antar kelurahan di kecamatan Harjamukti, (iii) untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan di kecamatan Harjamukti dilihat dari aspek ekonomi, aspek kependudukan, dan aspek fasilitas pelayanan publik, (iv) dan untuk mengetahui wilayah pembangunan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di kecamatan Harjamukti. Alat analisisnya adalah Analisis Basis Ekonomi dengan Metode Langsung, Analisis Gravitasi, Analisis Skalogram, dan Metode Overlay. Hasil Analisisnya menunjukkan Kelurahan Kecapi berpotensi

sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, pemukiman, dan kesehatan karena kelengkapan fasilitasnya, sedangkan Kelurahan Kalijaga berpotensi sebagai pusat pelayanan pemerintah karena merupakan ibukota kecamatan, dan pusat pemukiman, dan daerah wisata rohani. Kelurahan Harjamukti berpotensi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan lahan kosongnya berpotensi sebagai lahan peternakan. Kelurahan Larangan berpotensi sebagai pusat pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perdagangan jasa, karena jaraknya yang sangat dekat dengan Kelurahan Kecapi. Kelurahan Argasunya berpotensi sebagai pusat pemukiman, lahannya berpotensi untuk perkebunan dan peternakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andry Sujana pada tahun 2011 dengan judul “Analisis Penetapan Satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Tegal”. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tegal, kekuatan interaksi antar kecamatan tersebut, mengetahui kecamatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dan satuan wilayah pembangunan berdasarkan potensi daerah, kekuatan interaksi, dan pusat pertumbuhan tersebut. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis *Location Quotient (LQ)*, analisis gravitasi, dan analisis skalogram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 satuan wilayah pembangunan yang ditetapkan di Kabupaten Tegal antara lain SWP I meliputi Kecamatan Slawi, Dukuhturi, Talang, Tarub, Adiwerna, Pangkah, Dukuhwaru, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kecamatan Kedungbanteng. SWP II meliputi kecamatan Kramat, Wrureja dan

Kecamatan Suradadi. SWP III meliputi Kecamatan Margasari, Pagerbarang dan Kecamatan Balapulung. SWP IV meliputi Kecamatan Bumijaya dan Kecamatan Bojong.

Penelitian Restika Oki Nindhitya yang berjudul “Pemetaan Sub-sub Sektor Pertanian Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Daerah Kabupaten Wonosobo” ditulis pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sub sektor pertanian unggulan apa yang paling strategis untuk dikembangkan di tiap Kecamatan Kabupaten Wonosobo sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Wonosobo. Alat analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ), Shift Share, Klassen Typologi, Skalogram, dan Overlay. Hasil penelitian menunjukkan Sub sektor pertanian unggulan di masing-masing Kecamatan Kabupaten Wonosobo adalah sub sektor tanaman pangan di Kecamatan Sapuran, Kaliwiro, Sukoharjo, Selomerto, dan Mojotengah. Sub sektor peternakan di Kecamatan Kertek, dan Wonosobo. Sub sektor kehutanan berada di Kecamatan Sapuran, Kalibawang, dan Kaliwiro. Area pengembangan sub sektor tanaman pangan berada di Kecamatan Sapuran, Kaliwiro, Sukoharjo, Selomerto, dan Watumalang, sedangkan sentra industri sub sektor tanaman pangan berada di Kecamatan Sapuran. Area pengembangan sub sektor peternakan berada di Kecamatan Kertek, dan Wonosobo, sedangkan sentra industri sub sektor peternakan berada di Kecamatan Kertek. Area pengembangan sub sektor kehutanan berada di Kecamatan Sapuran, Kalibawang, dan Kaliwiro.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil
1	<i>ANALISIS PENETAPAN WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR</i> oleh Laloria N Pardede. 2009	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui potensi yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Toba Samosir - Mengidentifikasi kekuatan interaksi antar kecamatan yang ada di Kabupaten Toba Samosir - Mengetahui kecamatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan - Menetapkan wilayah pembangunan berdasarkan potensi daerah, kekuatan interaksi antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Ekonomi 2. Kekuatan Interaksi 3. Pusat Pelayanan 4. Pusat Pertumbuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis LQ 2. Analisis Gravitasi 3. Analisis Skalogram 	<p>Ada empat wilayah pembangunan yang dapat ditetapkan di Kabupaten Toba Samosir yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WP I meliputi Kecamatan Balige Kecamatan Laguboti, dan Kecamatan Tampahan 2. WP II meliputi Kecamatan Porsea, Kecamatan Ajibata dan Kecamatan Lumbanjulu, Kecamatan Uluan dan Kecamatan Pintu Pohan 3. WP III meliputi Kecamatan Silaen, Kecamatan Sigumpar dan Kecamatan Siantar Narumonda 4. WP IV meliputi Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau dan Kecamatan Borbor.

2.	<p><i>PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BANJARNEGARA</i> oleh Refika Ardila. 2012</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan 2. Mengetahui interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan <i>hinterlandnya</i> 3. Mengetahui kondisi perekonomian kecamatan dan sektor ekonomi potensial di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB 2. Pusat Pertumbuhan 3. PDRB per Kapita 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Skalogram 2. Indeks Sentralitas 3. Metode Gravitasi 4. Analisis Tipologi Klassen 5. Analisis LQ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperoleh enam kecamatan yang termasuk kecamatan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Banjarnegara, Madukarta, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja, Klampok dan Susukan. 2. Terdapat interaksi dan angka interaksi antara kecamatan pusat dengan kecamatan <i>hinterlandnya</i> berbeda-beda 3. Sebagian besar kecamatan masih berada pada daerah relative tertinggal 4. Rata-rata sektor basis menyebar secara merata di 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, namun sektor basis yang paling dominan adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. 5. Terdapat 6 kecamatan pusat yang saling berinteraksi dengan kecamatan disekitarnya
----	---	---	--	---	--

3.	<p><i>ANALISIS PENETAPAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI KECAMATAN HARJAMUKTI, CIREBON SELATAN</i> oleh Sasya Danastri. 2011</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambarkan keadaan sekarang pada wilayah pusat pertumbuhan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. 2. Mengetahui kekuatan interaksi antar daerah di Kecamatan Harjamukti. 3. Menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mengembangkan pusat pertumbuhan di Kecamatan Harjamukti. 4. Mengetahui wilayah pembangunan mana saja yang dapat ditetapkan sebagai kutub pertumbuhan untuk mendorong pembangunan wilayah di Kecamatan Harjamukti. 	<p>Kekuatan Interaksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Fasilitas 2. Potensi Ekonomi 	<p>1. Analisis Basis Ekonomi dengan metode langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Analisis Gravitasi 3. Analisis Skalogram 4. Metode Overlay 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Kecapi berpotensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, pemukiman, dan kesehatan karena kelengkapan fasilitasnya, 2. Kelurahan Kalijaga berpotensi sebagai pusat pelayanan pemerintah karena merupakan ibukota kecamatan, dan pusat pemukiman, dan daerah wisata rohani. 3. Kelurahan Harjamukti berpotensi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan lahan kosongnya berpotensi sebagai lahan peternakan 4. Kelurahan Larangan berpotensi sebagai pusat pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perdagangan jasa, karena jaraknya yang sangat dekat dengan Kelurahan Kecapi. 5. Kelurahan Argasunya berpotensi sebagai pusat pemukiman, lahannya berpotensi untuk perkebunan dan peternakan.
----	--	---	---	---	--

4.	<p><i>ANALISIS PENETAPAN SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TEGAL</i> oleh Andry Sujana. 2011</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tegal, 2. Mengetahui kekuatan interaksi antar kecamatan tersebut, 3. Mengetahui kecamatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dan satuan wilayah pembangunan berdasarkan potensi daerah, kekuatan interaksi, dan pusat pertumbuhan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Ekonomi 2. Interaksi 3. Pusat Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis LQ 2. Analisis Gravitasi 3. Analisis Skalogram 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 4 satuan wilayah pembangunan yang ditetapkan di Kabupaten Tegal antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. SWP I meliputi Kecamatan Slawi, Dukuhturi, Talang, Tarub, Adiwerna, Pangkah, Dukuhwaru, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kecamatan b. Kedungbanteng. SWP II meliputi kecamatan Kramat, Wrureja dan Kecamatan Suradadi. c. SWP III meliputi Kecamatan Margasari, Pagerbarang dan Kecamatan Balapulung. d. SWP IV meliputi Kecamatan Bumijaya dan Kecamatan Bojong.
----	--	---	--	--	--

5.	<p><i>PEMETAAN SUB-SUB SEKTOR PERTANIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO</i> oleh Restika Oki Nindhitya. 2012</p>	<p>1. Menganalisis sub sektor pertanian unggulan apa yang paling strategis untuk dikembangkan di tiap Kecamatan Kabupaten Wonosobo sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Wonosobo</p>	<p>1. Sub-sub sektor pertanian</p>	<p>1. Analisis LQ 2. <i>Shift Share</i>, 3. Klassen Typologi, 4. Skalogram 5. Metode Overlay</p>	<p>1. Sub sektor pertanian unggulan adalah sub sektor tanaman pangan di Kecamatan Sapuran, Kaliwiro, Sukoharjo, Selomerto, dan Mojotengah. 2. Sub sektor peternakan di Kecamatan Kertek, dan Wonosobo, Sub sektor kehutanan berada di Kecamatan Sapuran, Kalibawang, dan Kaliwiro. 3. Area pengembangan sub sektor tanaman pangan berada di Kecamatan Sapuran, Kaliwiro, Sukoharjo, Selomerto, dan Watumalang, sedangkan sentra industri sub sektor tanaman pangan berada di Kecamatan Sapuran. Area pengembangan sub sektor peternakan berada di Kecamatan Kertek, dan Wonosobo, sedangkan sentra industri sub sektor peternakan berada di Kecamatan Kertek. 4. Area pengembangan sub sektor kehutanan berada di Kecamatan Sapuran, Kalibawang, dan Kaliwiro, sedangkan sentra industri sub sektor kehutanan berada di Kecamatan Sapuran</p>
----	---	---	------------------------------------	--	---

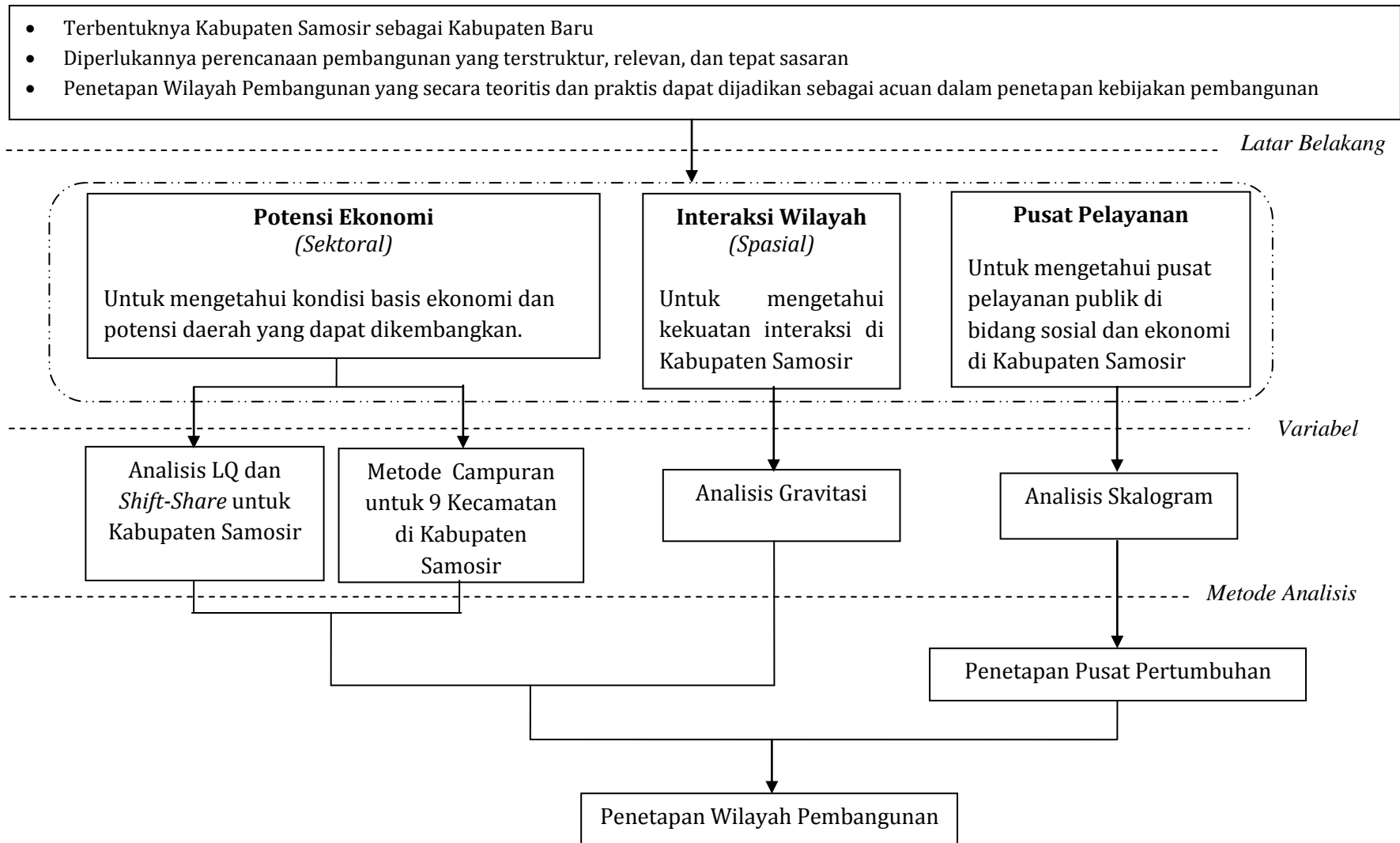
2.3 Kerangka Pemikiran

Penetapan Wilayah Pembangunan secara teoritis perlu memperhatikan aspek sektoral dan spasial. Penetapan Wilayah Pembangunan di daerah pada umumnya mengacu pada teori kutub pertumbuhan dengan memperhatikan sektor basis dan potensi ekonomi dari masing-masing daerah (sektoral) serta kekuatan interaksi antar daerah yang bersangkutan (spasial).

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya yaitu: Kabupaten Samosir sebagai kabupaten baru memerlukan perencanaan pembangunan yang terstruktur, relevan dan tepat sasaran. Penetapan wilayah pembangunan sangat penting diterapkan di wilayah Kabupaten Samosir karena secara teoritis dan praktis, Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan pembangunan ekonomi.

Wilayah-wilayah pembangunan yang merupakan output dari penelitian ini dapat ditentukan dengan menganalisis pusat pertumbuhan di Kabupaten Samosir, Kekuatan Interaksi dan Potensi ekonomi wilayah tersebut. Pusat pertumbuhan di Kabupaten Samosir dapat ditentukan dengan menetapkan pusat pelayanan yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis skalogram yang memberikan gambaran pertumbuhan suatu daerah berdasarkan tingkat fasilitas pelayanan yang tersedia di suatu daerah. Potensi ekonomi dianalisis dengan menggunakan analisis LQ dan Shift-Share serta metode campuran. Kekuatan interaksi dianalisis dengan menggunakan metode gravitasi.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel menunjukkan suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya (Kountur, 2004). Definisi operasional adalah petunjuk yang lainnya tentang variabel-variabel yang diukur. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi yang dimaksud adalah sektor perokonomian yang dapat dikembangkan, atau dapat diciptakan dan kemudian dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik wilayah tersebut. Potensi ekonomi tersebut juga adalah sektor perekonomian yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Potensi ekonomi Kabupaten diukur dengan menganalisis data PDRB Kabupaten dan PDRB Provinsi dengan menggunakan metode analisis LQ dan *shift-share*, sedangkan potensi ekonomi tiap-tiap kecamatan ditentukan dengan metode campuran.

3.1.2 Interaksi Spasial

Interaksi Spasial adalah hubungan atau kontak yang terjadi antara daerah perkotaan dengan pedesaan, beserta hasil hubungannya. Interaksi spasial antara daerah yang satu dengan yang lainnya diukur dengan menganalisis data jumlah

penduduk kedua wilayah dan jarak antar wilayah tersebut dengan menggunakan analisis gravitasi.

3.1.3 Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan adalah konsentrasi pemukiman penduduk dan beberapa fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial sehingga intensitas kegiatan arus barang dan manusia dari dan ke pusat-pusat tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pusat pelayanan ditentukan dengan analisis skalogram dengan memperhatikan :

1. Jumlah penduduk yang bermukim pada pusat tersebut
2. Jumlah fasilitas pelayanan umum yang tersedia, dan
3. Jumlah jenis fasilitas pelayanan umum yang tersedia.

3.1.4 Pusat Pertumbuhan.

Dalam penelitian ini, pusat pertumbuhan ditentukan berdasarkan pusat pelayanan yang telah ditentukan dengan menggunakan analisis skalogram.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Pengumpulan data Primer bersumber dari berbagai pihak seperti:

- a. Komunikasi langsung dengan Mantan Kepala BAPPEDA Kabupaten Samsir
 - b. Komunikasi langsung dengan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Samsir
 - c. Komunikasi langsung dengan Camat dan atau staf kecamatan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Samsir
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Nur dan Bambang, 2002). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain:
- a. BAPPEDA Kabupaten Samsir : RPJMD dan RTRW Kabupaten Samsir
 - b. BPS Provinsi Sumatera Utara : Sumatera Utara Dalam Angka 2011
 - c. BPS Kabupaten Samsir : Samsir Dalam Angka 2012, Kecamatan Dalam Angka 2012 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samsir 2006-2011
 - d. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Samsir : Peta Kabupaten Samsir dan kecamatan-kecamatan di dalamnya.
 - e. Bakosurtanal : Peta digital Kabupaten Samsir.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari hasil publikasi lembaga-lembaga atau instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mewawancarai langsung responden yang akan dijadikan sampel untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan bantuan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Indeks LQ (*Location Quotient*)

Indeks LQ adalah salah satu alat analisis dasar yang dapat digunakan dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya ekonomi pembangunan regional. Miller dkk (1991) dalam jurnal yang berjudul "*Location Quotient: A Basic Tool for Economic Development Analysis*" mendefinisikan tujuan dari penggunaan LQ sebagai berikut.

The purpose of the location quotient technique is to yield a coefficient, or a simple expression of how well represented a particular industry is in a given study region....With this technique, we can determine whether or not the study region has its "fair share" of some industry, given the experience of the reference region.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa tujuan penggunaan LQ adalah untuk menghasilkan sebuah koefisien yang dapat merepresentasikan suatu fakta tentang industri dengan baik dalam kaitannya dengan studi kewilayahan. Oleh karena

itu, teknik LQ dapat menentukan apakah sektor-sektor perekonomian dalam suatu wilayah memberikan proporsi yang sama dalam pembentukan pendapatan (misalnya) dalam suatu daerah.

Tarigan (2005) memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang Location Qoutient. Menurutnya, Location Qoutient (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang yang dapat diperbandingkan, tetapi yang umum adalah tingkat pendapatan dan jumlah lapangan kerja.

rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PDRB sektor } i / \text{PDRB total}}{\text{PNB sektor } i / \text{PNB total}} \dots\dots\dots(3.1)$$

dengan :

- PDRB sektor *i* : nilai tambah sektor *i* pada PDRB di suatu daerah
- PDRB total : total PDRB di suatu daerah
- PNB sektor *i* : nilai tambah sektor *i* pada PNB suatu negara (daerah dengan hierarki lebih tinggi)
- PNB total : total PNB di suatu negara (PDRB daerah dengan hierarki satu tingkat lebih tinggi)

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan $LQ > 1$, berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan $LQ < 1$, berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor) (Tarigan, 2005).

3.4.2 Analisis *Shift-Share*

Analisis *Shift-Share* juga digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah dengan daerah di atasnya (daerah dengan hierarki lebih tinggi). Metode ini memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan secara rinci atas beberapa variabel. Analisis ini mengisolasi berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu periode waktu ke periode berikutnya. Metode ini juga sering disebut sebagai *industrial mix analysis*. Analisis *shift-share* dapat diurai menjadi komponen *shift* dan komponen *share*.

Komponen *share* sering pula disebut komponen *national share*. Komponen *national* (N) adalah banyaknya penambahan lapangan kerja regional dengan asumsi proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode studi. Hal ini dapat dipakai sebagai criteria lanjutan bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata.

Komponen *shift* adalah penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan lapangan kerja regional. Bagi setiap daerah, *shift netto* dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu *proportional shift component* (P) dan *differential shift component* (D). *Proportional shift component* (P) mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang

bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat, dan negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan merosot.

Sedangkan *differential shift component* (D) mengukur *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah akan mempunyai *differential shift component* yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

Kedua komponen *shift* ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat ekstern dan intern. *Proportional Shift* adalah akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional, sedangkan *differential shift component* adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja secara khusus di daerah yang bersangkutan.

Dengan menggunakan notasi aljabar, hubungan antar komponen-komponen dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\Delta E_r = (N_s + P_r + D_r) \dots\dots\dots(3.2)$$

Pertambahan lapangan kerja adalah penjumlahan dari *national share*, *proportional share*, dan *differential share*. Formula diatas dapat juga diaplikasikan di masing-masing sektor tertentu.

Peranan *National share* adalah seandainya pertambahan lapangan kerja regional sektor i tersebut sama dengan proporsi pertambahan rata-rata. Formulasnya adalah:

$$Ns_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots(3.3)$$

Proportional shift adalah melihat pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan lapangan kerja sektor i pada wilayah yang dianalisis. Formulasnya adalah sebagai berikut:

$$P_{r,i,t} = \left(\frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (3.4)$$

Differential shift menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan sektor i di wilayah yang dianalisis terhadap pertumbuhan sektor i, secara nasional. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$D_{r,i,t} = \left(\frac{\Delta E_{r,i,t}}{E_{r,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots(3.5)$$

dengan :

- Δ : pertambahan
- N : Nasional
- r : *region* atau wilayah analisis
- E : *Employement* atau banyaknya tenaga kerja
- i : sektor industri
- t : tahun

t-n : tahun awal
Ns : *National share*
Pr : *Proportional share*
Dr : *Differential share*

3.4.3 Metode Campuran

Metode campuran adalah alternatif dalam menentukan potensi ekonomi suatu wilayah dengan menggabungkan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang dilakukan dengan survei langsung langsung kepada pelaku usaha dan kegiatannya. Survey yang dimaksud meliputi arus keluar masuk barang dan jasa seperti kemana barang yang diproduksi dipasarkan dan darimana mereka membeli bahan dasar produksi. Kemudian dapat ditentukan persentase produk yang dijual ke luar wilayah dan yang dipasarkan ke dalam wilayah.

Metode tidak langsung adalah mengukur kegiatan basis dan nonbasis dengan menggunakan asumsi sehingga disebut pula sebagai metode asumsi. Dalam metode asumsi, berdasarkan kondisi wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai nonbasis. Kegiatan yang mayoritas penduduknya dijual ke luar wilayah atau mayoritas uang masuknya berasal dari luar wilayah langsung dianggap basis, sedangkan yang mayoritas produknya dipasarkan lokal dianggap nonbasis.

3.4.4 Model Gravitasi

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, model gravitasi adalah suatu teknik untuk menganalisis pola interaksi ruang. Model Gravitasi ini di

dasari oleh Hukum Gravitasi Newton (Sir Isaac Newton) yang berbunyi “dua massa yang berdekatan akan saling tarik menarik dan daya tarik masing-masing massa adalah sebanding dengan bobotnya.”

Aplikasi model Gravitasi biasanya bermanfaat dalam bidang analisis perencanaan wilayah dengan anggapan dasar bahwa faktor aglomerasi penduduk, pemusatan kegiatan atau potensi sumber daya alam yang dimiliki, mempunyai daya tarik yang dapat dianalogikan sebagai daya tarik menarik antara 2(dua) kutub magnet.

Menurut Hayness dan Fotheringham (1984), Persamaan umum model gravitasi ini adalah :

$$I_{12} = P_1 P_2 / J_{12} \dots\dots\dots(3.6)$$

dengan:

I_{12} : interaksi antara wilayah 1 dan 2

P_1 : jumlah penduduk wilayah 1

P_2 : jumlah penduduk wilayah 2

J_{12} : jarak antara wilayah 1 dengan wilayah 2

Maka, semakin besar indeks I yang ditemukan berdasarkan hubungan antara 2 wilayah, maka semakin besar pula kekuatan interaksi antara kedua wilayah yang dianalisis tersebut.

3.4.5 Analisis Skalogram

Analisis Skalogram dipergunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman, khususnya hierarki atau orde-orde pusat pertumbuhan. Analisis ini dapat digunakan dengan mendasarkan kepada jumlah unit dan jenis fasilitas yang ada. Analisis *scalogram* mengelompokkan klasifikasi wilayah berdasarkan pada tiga komponen fasilitas dasar yang dimilikinya yaitu:

- a. *differentiation* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja;
- b. *solidarity* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*benefit oriented*);
- c. *centrality* adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi-politik/pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui

perkembangan hierarki dari institusi sipil, misalnya kantor pos, sekolah, kantor pemerintahan dan sejenisnya.

Analisis skalogram pada penelitian ini menggunakan 20 objek dan 9 subjek.

Subjek yang digunakan adalah 9 kecamatan dan objeknya adalah:

1. Fasilitas Pendidikan (SD, SMP dan SMA/SMK)
2. Fasilitas Kesehatan (RS, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Posyandu)
3. Fasilitas Peribadatan (Gereja dan Masjid)
4. Fasilitas Ekonomi (Koperasi, Bank, Pasar dan Kelompok Pertokoan)
5. Fasilitas Pendukung (Hotel, Kantor Pos, Dermaga, Terminal dan Pariwisata)

Menganalisis banyaknya kelas dari masing-masing kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, digunakan metode Sturges (Tarigan, dalam Masiun 2012) dan (Saruhian, dalam Masiun 2012), dengan rumus sebagai berikut:

$$k = 1 + 3.3 \text{ Log } n \dots\dots\dots(3.7)$$

Selanjutnya menentukan besarnya interval kelas, dengan cara:

$$I = \frac{A-B}{k} \dots\dots\dots(3.8)$$

Dimana: I : Interval Dimana
 k : banyaknya kelas
 n : banyaknya kecamatan
 A : jumlah fasilitas tertinggi
 B : Jumlah fasilitas terendah